

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan dua hal yang saling berhubungan satu sama lain dan seperti sistem yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini terlihat ketika dikaitkan dengan sistem hubungan keuangan pusat dan daerah, dimana keuangan daerah khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut berasal dari pusat untuk mendukung keberhasilan-keberhasilan pemerintah daerah yang menjadi tujuan negara.

Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen paling penting yang mengundang perhatian publik. Hal itu disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana publik melalui pajak daerah yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya, efisien, efektif dan berorientasi pada kepentingan publik. Dalam hal belanja daerah terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah akan dinilai baik apabila kinerja belanjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan.

Menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara melihat kinerjanya melalui Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan

realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran juga menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, struktur APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Belanja Daerah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok. Pertama, Belanja Tidak Langsung (Belanja Aparatur) yang terdiri dari Belanja Pegawai (gaji), Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, serta Belanja tak Terduga. Kedua, Belanja Langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Idealnya belanja aparat harus lebih kecil daripada belanja publik, artinya dana yang dihimpun dari masyarakat benar-benar dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokus penelitian pada BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Bandung. BPKAD Kota Bandung merupakan Badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan. Sesuai Peraturan Walikota No. 1404 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tupoksi serta tata kerja, BPKA merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, maka dari itu dalam kinerjanya perlu

diperhatikan. Salah satu ukuran kinerja yang baik ditunjukkan dari laporan keuangannya. Saat ini ada kelemahan-kelemahan kinerja pada pemerintah kota Bandung. Hal tersebut ditunjukkan dengan Laporan Keuangan Kota Bandung masih mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Alasan masih mendapat opini WDP karena ada berbagai macam hal masalah seperti aset-aset yang belum tuntas.

Dalam pengelolaan belanja, khususnya dalam belanja langsung, BPKAD Kota Bandung mengalokasikan anggaran belanja yang cukup besar, sedangkan realisasinya tidak mencapai target 100%, memang pada dasarnya dalam belanja tidak dianjurkan untuk melebihi batas maksimum, harus adanya efisiensi. Peneliti dapat mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nominalnya atau persentasenya. Diketahui bahwa adanya permasalahan terkait selisih anggaran pada belanja di BPKAD Kota Bandung ini, dari tahun ke tahun terdapat selisih anggaran yang tidak stabil. Jika terjadi selisih kurang maka sangat mungkin telah terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga estimasi belanjanya kurang tepat, atau tidak terserapnya anggaran tersebut bisa jadi disebabkan karena ada program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan padahal sudah diamanatkan dalam anggaran.

Hal tersebut menjadi bahan pertanyaan, apakah selisih tersebut cukup beralasan atau dapat dipertanggungjawabkan atau tidak? Dalam permasalahan varians belanja langsung dapat ditunjukkan data sebagai berikut:

Tabel 1.1
Selisih Varians Belanja Langsung BPKAD Kota Bandung TA
2012-2016

Tahun	Anggaran	Realisasi	Varians (Selisih)	Persentase (%)
2012	266.558.184.606,35	228.329.186.101,00	(38.228.998.505)	85,65 %
2013	187.904.050.142,00	88.588.764.862,00	(99.315.285.280)	47,14 %
2014	280.459.447.000,00	157.526.346.822,00	(122.933.100.178)	56,16 %
2015	355.556.615.134,00	132.232.281.440,00	(223.324.333.694)	37,19 %
2016	102.054.047.761,99	43.554.437.743,00	(58.499.610.019)	42,67 %

Sumber : Ringkasan LRA BPKAD Kota Bandung TA 2012-2016 (diolah oleh penulis)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, menunjukkan bahwa antara anggaran dan realisasi belanja langsung adanya selisih kurang. Sebetulnya dalam analisis varians anggaran, nilai selisih tidak hanya dilihat dari persentase, akan tetapi dilihat dari nilai (nominalnya) besar atau kecil. Jika dilihat dari nilai selisih anggaran belanja langsung paling besar terjadi pada tahun 2015 yaitu 223.324.333.694 dengan persentase 37,19 %, sedangkan nilai selisih anggaran paling kecil terjadi pada tahun 2012 yaitu 38.228.998.505 dengan persentase 85,65%. Selisih antara anggaran dengan realisasi belanja dari tahun ke tahun selama 5 tahun anggaran mengalami peningkatan secara nominal, kecuali pada tahun 2016 mengalami penurunan secara drastis. Secara persentase besarnya tidak stabil yakni terjadi peningkatan dan penurunan tiap tahunnya, karena persentase bukan ukuran yang mutlak untuk menganalisis varians belanja. Terkadang persentase lebih besar dibandingkan nilai nominalnya, ataupun sebaliknya.

Fenomena masalah yang lainnya yaitu pertumbuhan belanja, belanja langsung pada BPKAD Kota Bandung dari tahun ke tahun yaitu fluktuasi. Hal tersebut perlu diketahui alasannya. Apakah disebabkan karena faktor internal yang

relatif terencana dan terkendali ataukah faktor eksternal yang diluar kendali pemerintah daerah. Saat ini dalam pengelolaan keuangan menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja, yang mana setiap anggaran harus dikaitkan dengan target kinerja, maka kecenderungan untuk terus meningkatkan anggaran tidak perlu lagi terjadi. Dalam permasalahan pertumbuhan belanja langsung dapat ditunjukkan oleh data sebagai berikut:

Tabel 1.2
Pertumbuhan Belanja Langsung BPKAD Kota Bandung TA 2012-2016

Tahun	Realisasi Belanja Langsung thn t- thn (t-1)		Selisih Pertumbuhan Realisasi Belanja Langsung	Hasil Persentase (%)
	Tahun t	Tahun t-1		
2012	228.329.186.101,00			
2013	88.588.764.862,00	228.329.186.101,00	- 1.397404211	- 0,61
2014	157.526.346.822,00	88.588.764.862,00	68.937.581.960	77,81
2015	132.232.281.440,00	157.526.346.822,00	- 25.294.065.382	-16,06
2016	43.554.437.743,00	132.232.281.440,00	- 88.677.843.697	- 67

Sumber : Ringkasan LRA BPKAD Kota Bandung TA 2012-2016 (data diolah penulis)

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja langsung dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan, artinya pertumbuhan belanja langsung ini tidak stabil. Tingkat pertumbuhan belanja langsung yang mengalami kenaikan terjadi pada tahun 2013 yaitu 88.588.764.862,00 dan tahun 2014 yaitu 157.526.346.822,00 dengan selisih 68.937.581.960 atau mencapai 77,81% sedangkan pertumbuhan belanja langsung yang mengalami penurunan paling besar terjadi pada tahun 2015 yaitu 132.232.281.440,00 dan tahun 2016 yaitu 43.554.437.743,00 dengan selisih - 88.677.843.697 atau mencapai -67%.

Fenomena masalah lainnya mengenai keserasian belanja yang bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Dalam pengelolaan belanja pada BPKAD Kota Bandung adanya ketidakserasian dalam pengalokasian belanja khususnya dalam belanja langsung. Dalam permasalahan keserasian belanja dapat ditunjukkan oleh data sebagai berikut:

Tabel 1.3
Keserasian Belanja BPKAD Kota Bandung TA 2012-2016

Tahun	Belanja Langsung (Rupiah)	Belanja Tidak Langsung (Rupiah)	Total Belanja	(%) BL	(%) BTL
2012	266.558.184.606,35	11.327.616.762,95	277.885.801.369,30	95,92	4,08
2013	187.904.050.142,00	14.728.420.027,50	202.632.470.169,50	92,73	7,27
2014	280.459.447.000,00	15.424.352.790,00	295.883.799.790,00	94,78	5,22
2015	355.556.615.134,00	21.550.279.365,62	377.106.894.499,62	94,28	5,72
2016	288.661.563.507,00	102.054.047.761,99	390.715.611.268,99	73,88	26,12

Sumber: Ringkasan LRA BPKAD Kota Bandung TA 2012-2016 (data diolah penulis)

Berdasarkan tabel 1.3 di atas, menunjukkan bahwa porsi Belanja Langsung lebih besar daripada Belanja Tidak Langsung terhadap total Belanja BPKAD Kota Bandung. Persentase porsi belanja langsung bisa dibilang cukup stabil, penurunan terbesar terjadi pada tahun 2016 sebesar 73,88%. Dapat disimpulkan bahwa pengalokasian belanja di BPKAD Kota Bandung, cenderung lebih besar mengalokasikan belanja langsung ketimbang belanja tidak langsung. Memang pada dasarnya porsi belanja langsung harus lebih diprioritaskan, akan tetapi harus diperhatikan nominalnya, anggaran yang dibuat terlalu besar terkadang seringkali adanya kelemahan dalam perencanaan anggaran.

Tabel 1.4
Realisasi Belanja Langsung BPKAD Kota Bandung TA 2012-2016

Belanja Langsung	Belanja Pegawai	Belanja Barjas	Belanja Modal	Jumlah
2012	3.958.108.000,00	10.077.529.161,00	214.293.548.940,00	228.329.186.101,00
2013	4.348.156.000,00	11.557.823.132,00	72.682.785.730,00	88.588.764.862,00
2014	4.715.347.000,00	13.173.490.352,00	139.637.509.470,00	157.526.346.822,00
2015	7.958.405.000,00	14.807.291.770,00	109.466.584.670,00	132.232.281.440,00
2016	17.902.451.960,00	25.651.985.783,00	51.189.717.431,00	43.554.437.743,00

Sumber: Ringkasan LRA BPKAD Kota Bandung TA 2012-2016

Berdasarkan tabel 1.4 diatas, menunjukkan bahwa penempatan alokasi belanja langsung secara keseluruhan dalam realisasinya kerap terjadi fluktuasi, seperti pada realisasi belanja pegawai dari tahun ke tahun mengalami peningkatan anggaran, begitupun dengan realisasi belanja barang dan jasa dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan anggaran. Berbeda halnya dengan realisasi belanja modal, mengalami peningkatan serta penurunan setiap tahunnya. Hal tersebut disesuaikan dengan pelaksanaan program-program atau kegiatan yang dijalankan. Berdasarkan data diatas pula menunjukkan bahwa pengalokasian belanja modal lebih besar dibandingkan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Memang pada dasarnya belanja modal harus lebih diutamakan akan tetapi berdasarkan data dilihat dari anggaran dan realisasinya nominalnya cukup besar, sehingga perlu diketahui alasannya dan disesuaikan juga dengan program-program yang dilaksanakan, apakah sudah maksimal atau belum.

Fenomena masalah lainnya mengenai efisiensi belanja. Dalam pengelolaan belanja langsung, BPKAD kota Bandung sudah cukup melakukan efisiensi anggaran karena rasio efisiensinya kurang dari 100%. Akan tetapi walaupun dari tahun ke tahun adanya efisiensi anggaran, harus dilihat lagi output dari belanja

tersebut. Apakah program atau kegiatan pemerintah kota Bandung terlaksanakan dengan maksimal atau tidak dengan adanya efisiensi anggaran yang justru terlalu besar. Selama tidak melebihi dari 100% tidak apa-apa, asalkan belanja yang dianggarkan sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya. Persentase efisiensi belanja langsung pada BPKAD Kota Bandung dapat ditunjukkan oleh data sebagai berikut:

Tabel 1.5
Efisiensi Belanja Langsung BPKAD Kota Bandung TA 2012-2016

Tahun	Anggaran	Realisasi	Efisiensi
2012	266.558.184.606,35	228.329.186.101,00	85,65 %
2013	187.904.050.142,00	88.588.764.862,00	47,14 %
2014	280.459.447.000,00	157.526.346.822,00	56,16 %
2015	355.556.615.134,00	132.232.281.440,00	37,19 %
2016	102.054.047.761,99	43.554.437.743,00	42,67 %

Sumber: Ringkasan LRA BPKAD Kota Bandung TA 2012-2016

Berdasarkan tabel 1.5 di atas, menunjukkan bahwa tingkat efisiensi belanja tertinggi terjadi pada tahun 2015 dengan persentase sebesar 37,19% akan tetapi ditahun-tahun sebelumnya mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2012 sebesar 85.65%, tahun 2013 sebesar 47,14% dan tahun 2014 sebesar 56,16%. Kenaikan pun terjadi pada tahun setelahnya yaitu tahun 2016 sebesar 42,67%.

Adapun program-program secara umum yang berkaitan dengan belanja langsung pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6
Program yang berhubungan dengan Belanja Langsung
pada BPKAD Kota Bandung

Nama Program	Persentase (%)		
	2012	2015	2016
Program Perencanaan Tata Ruang	0,29	65,97	-
Program Pengembangan Data/Informasi	96,53	96,61	84,46
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	48,34	31,48
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	86,57	33,87	17,41
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	21,80	74,62	82,44
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	97,35	73,17	92,24
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	87,42	93,47	82,72
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	93,04	85,10	75,88
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	77,46	56,61	65,68
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	99,85	98,76	94,49
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	94,25	87,95	91,48
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	97,14	84,30	97,46
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	100,00	69,90	40,37

Sumber: Ringkasan LPAD pada BPKAD Kota Bandung

Berdasarkan tabel 1.6 di atas, menunjukkan bahwa terdapat program-program secara umum yang berkaitan dengan belanja langsung, pada program-program tersebut menunjukkan bahwa capaian realisasinya belum mencapai 100%. Memang pada dasarnya pada belanja perlu adanya efisiensi anggaran belanja. Akan tetapi selama tidak melebihi 100%, alangkah lebih baiknya untuk memaksimalkan anggaran yang telah ditentukan untuk menjalankan program-program tersebut dengan baik atau maksimal. Dari program-program tersebut perlu dilakukan analisis, termasuk penyebab terjadinya peningkatan atau penurunan capaian kerjanya.

Berdasarkan fenomena-fenomena masalah diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan dalam pengelolaan belanja langsung pada BPKAD Kota Bandung perlu ditinjau lebih jelas jika dilihat dari dimensi varians belanja, pertumbuhan belanja, keserasian belanja serta efisiensi belanja. Apabila kualitas Anggaran Daerah rendah, maka kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintah Daerah juga cenderung lemah. Bila hal ini terjadi, maka visi dan misi yang akan datang akan sulit untuk dicapai. Anggaran Daerah sebagai rencana kerja Pemerintah Daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam suatu periode tertentu (satu tahun), selama ini memang belum mampu memainkan peranannya secara optimal. Anggaran daerah diharapkan mampu memainkan perannya sebagai instrumen kebijakan dan instrumen manajemen bagi Pemerintah Daerah khususnya bagi BPKAD Kota Bandung selaku SKPD.

Dengan begitu, dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan penentuan strategi, prioritas serta kebijakan alokasi anggaran akan lebih berorientasi pada tuntutan dan kebutuhan publik, karena mekanisme perencanaan pembangunan dan juga perencanaan Anggaran Daerah merupakan proses yang mengakar.

Berdasarkan fenomena masalah di atas, menjadi salah satu dasar ketertarikan penulis untuk menganalisis secara khusus anggaran dan realisasi belanja langsung pada BPKAD Kota Bandung, dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Kinerja Keuangan dalam Pengelolaan Belanja Langsung pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2012-2016”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Adanya serapan anggaran belanja langsung yang tidak optimal hingga 100% serta adanya selisih kurang antara anggaran dengan realisasi yang nominalnya kurang wajar.
2. Adanya peningkatan dan penurunan pada pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun serta kurangnya pengalokasian belanja untuk dialihkan pada belanja lain yang prioritasnya lebih penting.
3. Tidak adanya keseimbangan/keserasian antar belanja, BPKAD lebih memprioritaskan belanja langsung, akan tetapi anggarannya terlalu besar khususnya belanja modal dan dalam pelaksanaan program cenderung ada yang tidak maksimal.
4. Adanya kelemahan perencanaan anggaran, sehingga dalam hal efisiensi cenderung banyak sekali anggaran yang tersisa. Hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan program atau kegiatan

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kinerja Keuangan dalam pengelolaan belanja langsung pada BPKAD Kota Bandung jika dilihat dari Analisis Varians Belanja?
2. Bagaimana Kinerja Keuangan dalam pengelolaan belanja langsung pada BPKAD Kota Bandung jika dilihat dari Analisis Pertumbuhan Belanja?
3. Bagaimana Kinerja Keuangan dalam pengelolaan belanja langsung pada BPKAD Kota Bandung jika dilihat dari Analisis Keserasian Belanja?
4. Bagaimana Kinerja Keuangan dalam pengelolaan belanja langsung pada BPKAD Kota Bandung jika dilihat dari Rasio Efisiensi Belanja?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami Kinerja Keuangan dalam pengelolaan belanja langsung pada BPKAD Kota Bandung jika dilihat dari Analisis Varians Belanja.
2. Untuk mengetahui dan memahami Kinerja Keuangan dalam pengelolaan belanja langsung pada BPKAD Kota Bandung jika dilihat dari Analisis Pertumbuhan Belanja.
3. Untuk mengetahui dan memahami Kinerja Keuangan dalam pengelolaan belanja langsung pada BPKAD Kota Bandung jika dilihat dari Analisis Keceragaman Belanja.
4. Untuk mengetahui dan memahami Kinerja Keuangan dalam pengelolaan belanja langsung pada BPKAD Kota Bandung jika dilihat dari Rasio Efisiensi Belanja.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a. Bagi Lembaga

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah kota Bandung untuk menciptakan Good Governance serta menjadi dorongan pemerintah daerah untuk menganalisis kinerja keuangan daerah khususnya dalam pengelolaan anggaran belanja daerah.

- b. Bagi Peneliti

- 1) Memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang tidak diperoleh di bangku kuliah.
- 2) Mengembangkan dan mencoba mengaplikasikan teori-teori yang peneliti peroleh di bangku kuliah.

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan praktis (penerapan teori) bagi ilmu pengetahuan dalam dunia organisasi atau pemerintahan yang sesungguhnya dan dapat digunakan sebagai informasi bagi yang membutuhkan.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini didasarkan pada adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 bahwa pengelolaan keuangan daerah adanya paradigma baru tersebut berupa tuntutan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik (*public oriented*).

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkatan capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran. Kinerja Keuangan Daerah dapat terlihat dari dua hal utama, hal tersebut berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran, sering juga disebut

dengan pendapatan dan belanja. Akan tetapi, penulis akan memfokuskan penelitian pada kinerja anggaran belanja langsung saja.

Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen paling penting yang mengundang perhatian publik. Hal itu disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana publik berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya atau tidak.

Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah dilakukan untuk mengevaluasi apakah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif. Kinerja Keuangan Belanja Daerah dinilai baik apabila realisasi belanja lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan.

Untuk mengukur kinerja keuangan belanja daerah menurut Mahmudi (2010:135) dapat dilakukan dengan membuat analisis anggaran khususnya analisis belanja, antara lain berupa:

1. Analisis Varians Belanja
2. Analisis Pertumbuhan Belanja
3. Analisis Keserasian Belanja
4. Rasio Efisiensi Belanja

Berdasarkan dengan adanya analisis terhadap belanja tersebut, diharapkan untuk dijadikan dasar evaluasi, koreksi dan perbaikan ke depan untuk meningkatkan kinerja keuangan dalam suatu pemerintahan daerah.

Dari uraian tersebut, maka peneliti menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran